

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
(STUDI PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Reza Al Fajar

10400114252

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA AL FAJAR

NIM : 10400114252

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 29 Maret 1996

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Alamat : BTN Bumi Somba Opu

Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Bulukumba)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Januari 2020

Penulis

Reza Al Fajar
10400114252

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)" yang disusun oleh REZA AL FAJAR, NIM: 10400114252, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggung jawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

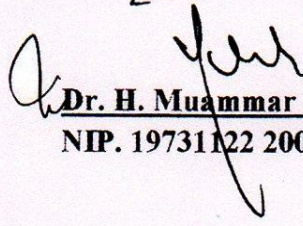
Gowa, 15 Januari 2020
19 Zulhijjah 1441

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Abd Rais Asmar, SH, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: St. Nurjannah, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrohim, puji dan syukur kepada Allah swt. atas berkat dan rahmat dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)”. Tak lupa pula ucapan shalawat penulis kirimkan kepada junjungan kita Rasullullah SAW.

Terima kasih kepada ayahanda **Abdul Azis** dan Ibunda **Zaenab** yang tercinta atas segala pengertiannya dan kasih sayang yang begitu tulus serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan, dan tak letihnya mengingatkan saya agar selalu taat dan bersyukur atas segala nikmat-Nya.

Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu Bab I berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan. Bab II berisikan Tinjauan Teoritis yang menguraikan tentang wanprestasi ,perjanjian ,akibat ,dan penyelesaian sengketa wanprestasi. Bab III berisikan Metodologi Penelitian. Bab IV berisikan hasil dan pembahasan penelitian dan terakhir Bab V yaitu kesimpulan dan implikasi penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimah kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag, beserta jajarannya.
3. Dr. Rahman Syamsuddin, SH.,M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Abd Rais Asmar, S.H., M.H, sebagai Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar,
4. Ayahanda Dr. Marilang, S.H.,M.Hum dan Ibunda St Nurjannah S.H., M.H Selaku Pembimbing dalam membantu saya penyusunan Skripsi , serta Tim Penguji Ibunda Istiqamah. S.H.,M.H dan Bapak Ashar Sinilele, S.H.,M.H atas segala masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas segala dedikasi yang telah diberikan dan seluruh staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum atas segala pelayanannya.
6. Teman-teman Ilmu Hukum F, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 57 Desa Barugaya Kecamatan Polut UIN Alauddin Makassar. Serta Sahabat-Sahabat terdekat saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih atas segala Motivasi, dukungan dan doanya.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi banyak pihak yang membacanya khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Gowa, Januari 2020

Reza Al Fajar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 6

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka..... 8

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN TEORITIS 11

A. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian 11

B. Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Akibat Wanprestasi 24

C. Faktor Terjadinya Wanprestasi 30

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan 33

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 35

B. Pendekatan Penelitian 36

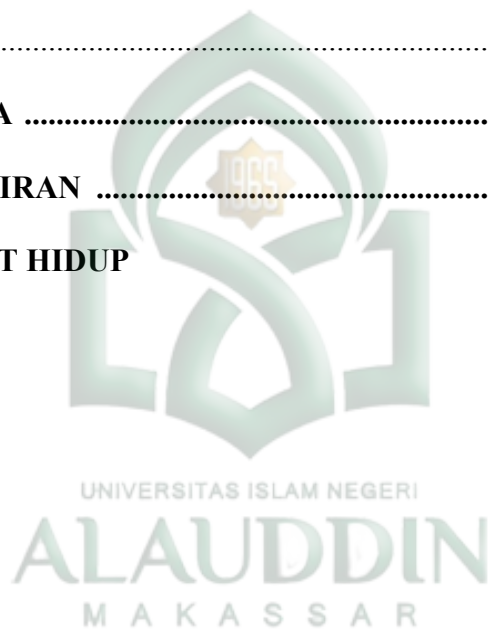
C. Sumber Data..... 38

D. Metode Pengumpulan Data 39

E. Instrument Penelitian 40

F. Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data..... 40

G. Pengujian Keabsahan data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Peneletian	42
B. Faktor Penyebab Wanprestasi Perjanjian Kredit	50
C. Proses Penyelesaian Kredit Macet di Pengadilan Negeri Bulukumba.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

NAMA : REZA AL FAJAR

N I M : 10400114252

**JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI (STUDI
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA)**

Penelitian ini berjudul penyelesaian sengketa wanprestasi (Studi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba) mengemukakan dua rumusan masalah yaitu, 1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. 2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penanganan dan pengambilan putusan mengenai kasus wanprestasi yang terjadi di kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan mengolah data hasil persidangan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke pengadilan dan dokumentasi ,sedangkan tekhnik pengolahan data menggunakan proses perbandingan kasus dari tahun ke tahun .

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba dan hasil putusannya berupa putusan minutasasi .Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI .Dan selebihnya wanprestasi Bank BRI .Keadaan Ekonomidi kabupaten Bulukumba masih terbilang Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan Hak dan Kewajiban .Sehingga tidak terjadi kasus wanprestasi seperti kebanyakan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pinjaman sehingga barang yang dijadikan sebagai jaminan di tarik oleh pihak bank.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dalam lingkup hukum perdata, dikenal ada dua hukum yang menjadi ruang lingkup hukum perdata yaitu hukum materiil dan hukum formilnya. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk

¹Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005). hlm.33.

mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya. Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) "menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit." Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (agent of trust), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuh kembang. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam

rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurang percaya masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada saat ini gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.² Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pengusaha (entrepreneur) untuk membiayai sektor riil. Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank: mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau

²Marilang, Azhar Sinelele, Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam upaya Menyelesaikan kasus wanprestasi nasabah Kartu kredit (Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1. No. 1 (2019) Hal. 2

bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).³ Bank sebagai sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi).⁴

Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W. yang menetapkan, “Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan: “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.⁵ Bank harus dapat mempertanggung jawabkan

³Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h.7.

⁴M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV.Rejeki

⁵Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013). hlm.125.

kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang.⁶ Berdasarkan uraian tersebutlah, penulis tertarik untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit khususnya yang berada di Bank BRI Cabang Bulukumba.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)”.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus tentang sejauh manakah pertimbangan Hakim dalam menghadapi kasus wanprestasi di Pengadilan Negeri Bulukumba dan faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi Kabupaten Bulukumba.

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian yang dianggap penting, yaitu:

a. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_Agung.2003).

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 578.

b. Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan yg eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari nasabahnya.⁸

c. Perjanjian

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang di setujui mereka.⁹ Putusan Pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan di ucapkan oleh Hakim dalam sidang.

C. `Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba?

D. Kajian Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang dipaparkan diatas, serta menguatkan dan mendukung peneltiaan ini maka peneliti menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu antara lain.

Hukum Perikatan Terbitan Alauddin University Press Karya Marilang . Dalam karaya tulis ini penulis mengambil beberapa bagian tentang hukum perikatan dan akibat melanggar dari perjanjian perikatan sehingga akibat hukum maupan proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sesuai UU dan perturan yg berlaku.Hukum Perbankan Nasional Indonesia Terbitan Prenada Media Grup

⁸Adrian Sutedi ,SH., MH , *Hukum Perbankan*. hlm. 115.

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 1.

karya Hermansyah. Dalam karya tulis ini penulis mengambil tentang UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yg telah direvisi/diubah menjadi UU no 23 Tahun 1999 jo UU no 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.¹⁰

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus wanprestasi di Kabupaten Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi di kabupaten bulukumba dan pertimbangan Hakim mengenai kasus wanprestasi di Kabupaten Bulukumba

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan pemerintah dan instansi perbankan dalam mengantisipasi kasus wanprestasi.
- b. Dapat di jadikan bahan pertimbangan oleh mahasiswa atau peneliti selanjutnya terhadap kasus dan masalah yang sama.
- c. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang wanprestasi dan proses penyelesaiannya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁰ Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk

¹⁰Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 225

tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹¹

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹² Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹³ Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.¹⁴

2. Asas-asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak dari para pihak untuk melakukan perjanjian. Beberapa asas tersebut adalah:

1. Asas Kebebasan (Freedom of Contract)

¹¹ Wiryono Prodjodikoro. 1979. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-VIII. Bandung. Bale. Hlm: 9

¹² Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin. Hlm: 77

¹³ Sudikno Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Loc.Cit.

Asas kebebasan dalam hukum perjanjian memandang bahwa setiap pihak bebas untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian atau tidak, bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun, bebas menentukan isi perjanjian, cara pelaksanaan, serta syarat-syarat perjanjian, dan bebas menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis. Asas tersebut telah ada sejak zaman Yunani dan mengalami perkembangan pada zaman Pertengahan (Rennaisance) dengan latar belakang paham individualisme yang memandang bahwa setiap orang bebas memperoleh apa saja yang dia kehendaki. Pelopor paham ini adalah Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

Pasal 1338 ayat (1) KUHP memuat ketentuan mengenai asas kebebasan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2. Asas Konsensualisme (Concensualism)

Asas ini memandang bahwa sebuah perjanjian disebut sah apabila ada kesepakatan, yakni persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas ini termaktub dalam pasal 1320 ayat (1) KUHP, berkaitan dengan bentuk perjanjian. Asas ini lahir dari hukum Romawi dan Jerman. Hukum Romawi mengenal asas *contractus verbis* lisan dan *contractus innominat*, sebuah perjanjian dianggap terjadi apabila memenuhi suatu bentuk yang ditetapkan. Sementara hukum Jerman, mengenal istilah perjanjian riil dan perjanjian formal. Disebut perjanjian riil apabila perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan secara kontan dan disebut perjanjian formal apabila perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis.

3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Asas kepastian hukum tersebut termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP.

4. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini memandang bahwa pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu nisbi dan mutlak. Itikad baik nisbi berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjek perjanjian secara nyata, sedangkan itikad baik mutlak memandang bahwa penilaian itikad baik menyangkut ukuran objektif dan tidak memihak berdasarkan norma-norma yang ada. Asas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) KUHP.

5. Asas Kepribadian (Personality)

Asas ini memandang bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1315 KUHP yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,” dan ditegaskan dalam pasal 1340: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

6. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 *BW* dan pasal 1340 *BW*. Pasal 1315 *BW*. selengkapnya berbunyi “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”.

7. Asas Pelengkap (Optional)

Subekti mengatakan bahwa Hukum Benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian memiliki sistem terbuka. Artinya, macam-macam atas benda memiliki sifat terbatas dan peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian, sebuah perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak. Kecuali, ada kasus khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 1317 KUHP: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian:¹⁵

¹⁵ *Idem*. Hlm: 228

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kekhilafan dan tidak ada penipuan. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:¹⁶

1) Orang-orang yang belum dewasa;

¹⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 34

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung).

Akibat hukum ketidakcakaan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

b. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*) Ada suatu sebab yang halal (causa). Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang

tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.¹⁷

4. Akibat hukum Sahnya Perjanjian

Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian adalah:

a. Berlaku Sebagai Undang-Undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

b. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

Karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga.

c. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

¹⁷ *Idem.* Hlm: 342

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdota dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdota. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian

pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.

Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.¹⁸Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang

¹⁸ Sutarno.2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hlm 82.

dibebani suatu kewajiban. Misal, dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani. Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal, disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

2. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya, masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

3. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam Buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

4. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misal jual beli.

5. Perjanjian yang sifatnya istimewa

a) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban.

Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara.

b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

c) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.

d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa.

e) Contohnya adalah perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).¹⁹

B. Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Akibat Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.²⁰ Wanprestasi adalah perbuatan ingkar

¹⁹ Achmad Busro.1985, *Hukum Perikatan*. Semarang, Oetama, hlm. 4.

²⁰ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia* . Op. Cit. Hlm: 203

janji dimana sebelumnya ada suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak melakukan perikatan tersebut sebagai dalam suatu perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²¹ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari, wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan .

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

²¹ Ahmadi Miru, *Op, Cit*, h.74

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka

debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga

dapat dikatakan wanprestasi

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).

Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²²

Overmacht di bagi dua yaitu:

a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut

²² A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUHPdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif

3. orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.
4. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.²³

5. Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.²⁴

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada beberapa bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

²³ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.123

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 246-247.

²⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1982), h. 148.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan waktunya tidak memenuhi prestasi sama sekali. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara menyatakan Debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Sommatie yaitu peringatan tertulis dari Kreditor kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
- b. Ingebreke Stelling yaitu peringatan Kreditor kepada Debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

2. Akibat Hukum Bagi yang Wanprestasi

Pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapat akibat hukum berupa hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:

- a. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, Kreditor dapat menuntut untuk memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).

- c. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika diperkarakan ke pengadilan dan Debitur dinyatakan bersalah.

C. Faktor Terjadinya Wanprestasi dan Proses Penyelesaian

1. Faktor Terjadinya Wanprestasi

Dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut :²⁶

- a . Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya, dilakukan secara subjektif.
- b. Dari pihak nasabah Yaitu kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan

²⁶ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 179-181.

macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

3. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam kasus kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁷

- a. Rescheduling Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka kredit, dimana

²⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. Op.Cit. h. 179-181

debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya : perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, sebagai contoh dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Reconditioning Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Antara lain :

- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
- 2) Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
- 3) Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut,

kan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Restructuring; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit,

menambah equity dengan menyeter uang tunai tambahan pemilik.

d. Kombinasi; merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas. 66

e. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah

benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu

membayar semua utangnya.

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Perjanjian Kerjasama

dalam hal bisnis adalah perjanjian yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dalam kasus wanprestasi dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan sebelumnya. Contoh dalam Putusan No 13/PDT.G.S/2018/PN Blk hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan penggugat, untuk melakukan penyitaan pada barang jaminan. Dalam perkara wanprestasi ini barang jaminan berupa tanah seluas 10.000m² yang merupakan tanah mahar dari ibu Murni yang dijadikan jaminan oleh bapak Dedi Dg Limpo di BRI cabang Bulukumba. Oleh Karena itulah ibu Murni melakukan keberatan pada hakim akan tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan penggugat dengan alasan saat melakukan pengajuan pinjaman kedua belah pihak telah menanda tangani perjanjian pinjaman tersebut. Pada tanggal 01-03-2018 dilakukan Sidang di pengadilan Bulukumba yang beralamat di Jl Kenari, No 5, Loka, Kabupaten Bulukumba, dengan amar putusan

yang di kabulkan pada tanggal 01—03-2018 dengan Hakim tunggal Yaitu Yusti
Cinianus Radjah S.H dan Panitera Abidin S.H.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kasus dan penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat. Misalnya, study secara intensif tentang sosial kebudayaan suatu kota metropolitan, study lapangan tentang kelompok masyarakat terpencil dan lain-lain.. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No23/pdt.G.S/2018/PN BLK. Bahan-bahan Pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu berkaitan tentang wanprestasi pada bank BRI Cabang Pasar Sentral Bulukumba.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bulukumba dan juga melalui catatan Putusan Pengadilan terdahulu yang memiliki kasus serupa. Dan juga penulis mengambil beberapa sampel dari buku maupun skripsi terdahulu yang memiliki kasus yang sama. Di Kabupaten Bulukumba sering terjadi kasus serupa

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* 2002 (Jakarta; Sinar Grafika), h.13

dimana warga meminjam uang atau mengambil pinjaman pada bank sebagai modal usaha dengan jaminan yang bermacam-macam seperti, Tanah, Rumah, Kendaraan, Emas dan lain sebagainya yang memiliki daya ikat yang kuat dan bisa menjadi jaminan. Lokasi penelitian bertempat di JL Kenari N.5, Loka, Kabupten Bulukumba, Sulaawesi Selatan 92511.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Sosiologi hukum (kajian sosio legal) sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi atau pendekatan interdisipliner dalam studi hukum. Beberapa ahli melihat sosiologi hukum sebagai turunan bidang sosiologi, namun ada juga yang menganggap ilmu ini sebagai bidang penelitian yang terperangkap di antara disiplin hukum dan sosiologi. Beberapa ahli lain mengelompokkan bidang ini bukan sebagai sub-disiplin sosiologi atau cabang studi hukum; tetapi merupakan bagian studi penelitian mengenai posisinya dalam tradisi ilmu sosial yang lebih luas. Dengan demikian, bidang ini dapat digambarkan tanpa mengacu pada sosiologi arus utama sebagai "studi hukum empiris yang sistematis, berdasarkan teori, sebagai perangkat praktik sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial". Sosiologi hukum telah digunakan untuk meletakkan hukum dan keadilan sebagai institusi fundamental dalam struktur dasar masyarakat yang menangani "kepentingan politik dan ekonomi, budaya dan tatanan normatif masyarakat, serta membangun dan memelihara kebergantungan yang resiprokal; namun membentuk dirinya sendiri sebagai sumber konsensus, kekerasan dan kontrol sosial". Terlepas apakah sosiologi hukum didefinisikan sebagai sub-disiplin sosiologi; namun sebuah pendekatan dalam studi hukum, atau suatu bidang penelitian yang mandiri, harus tetap bergantung pada kaidah ilmiah seperti tradisi intelektual, metode dan teori sosiologi arus utama, yang

berupa ilmu sosial dengan tingkat yang lebih rendah seperti antropologi sosial, ilmu politik, kebijakan sosial, kriminologi dan psikologi; dengan demikian, hal ini mencerminkan penggunaan teori sosial dan metode ilmiah sosial dalam mempelajari hukum, institusi hukum dan perilaku hukum.

Sosiologi hukum terdiri dari berbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor sosial. Bidang penyelidikan sosio legal meliputi pengembangan sosial lembaga hukum, bentuk kontrol sosial, pengaturan hukum, interaksi antara budaya hukum, konstruksi sosial dari masalah hukum, profesi hukum, dan hubungan antara hukum serta perubahan sosial.

Sosiologi hukum juga mendapat landasan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan pada bidang lainnya seperti hukum komparatif, kajian hukum kritis, yurisprudensi, teori hukum, hukum dan ekonomi, serta hukum dan sastra. Objek kajian sosiologi hukum mencakup pergerakan historis hukum dan keadilan, serta konstruksi kontemporer yang tanpa henti, misalnya, di bidang yurisprudensi yang berfokus pada pertanyaan kelembagaan yang dikondisikan oleh situasi sosial-politik di wilayah interdisipliner seperti kriminologi, dengan analisis efisiensi ekonomi dan dampak sosial atas norma hukum.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Yaitu data serta wawancara dari pihak

Instansi Pengadilan Negri Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan hasil wawancara dengan pihak terkait

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen berupa laporan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dari putusan pengadilan terdahulu yang mempunyai kasus serupa maupun buku—buku yg membahas tentang masalah tersebut.

Data sekunder terbagi 3 yaitu:

1. Sumber data primer di utamakan yaitu data yang diperoleh saecara langsung tanpa perantara
2. Data sekunder di utamakan yaitu data yang diperoleh melalui dukumen baik berupa buku, literature ataupun skripsi terdahulu
3. Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang ada hubunganya dengan penelitian yang akan dibahas.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Interview atau wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan objek penelitian ini, Yaitu Pihak Pengadilan negri Bulukumba Dan juga staff yang berwenang maupun pihak yang mempunyai andil dengan masalah seperti pihak tergugat dan pihak penggugat.

2. Pencatatan yaitu teknik pengumpulan data dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis atau bahan hasil wawancara yang berhubungan dengan masalah. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yang mencakup perilaku masyarakat melalui penelitian langsung terhadap masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yang mana dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian berupa catatan-catatan tertulis atau dokumen resmi pada PengadilanNagri Bulukumba berupa berkas dan akses untuk meneliti berkas .

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari informan sebagai sumber data penting dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa mengkaji atau menganalisis kasus dengan kasus yang telah ada maupun memberikan pertanyaan yang terkait dengan kasus. Yaitu berupa daftar pertanyaan dan alat tulis menulis.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian dengan menghasilkan data deskriptif,²⁹ yaitu apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis atau lisan pada saat wawancara dan dokumentasi, mengenai objek penelitian yaitu bagaimana proses pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran tanah Kemudian dari data tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan hasil peneliti melalui tahapan penyajian data serta penarikan kesimpulan

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 2007 (Jakarta ; Kencana), h.94

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam proses penulisan dan penelitian. Maka harus di dukung dengan data yang tepat pula. Kepercayaan penulisan menggambarkan kesesuaian konsep penelitian dan konsep yang ada pada target penelitian.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Kabupaten Bulukumba

Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal

dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar
- Sebelah Timur: Teluk Bone
- Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

Secara Topografi Kabupatedn Bulukumba adalah Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

2. Pengadilan Negeri Bulukumba

Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas IB yang terletak di jalan Kenari No 5 Kabupaten Bulukumba . Adapun sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Bulukumba Pada tahun 1602 Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur-jauh yang dinamakan VOC (De Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dengan tujuannya untuk berniaga, maka melalui VOC tersebut Belanda masuk ke Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil membuat Sultan Banten menyerahkan daerahnya kepada Kompeni. Pada tanggal 26 Maret 1620 dibuat resolusi yang mengangkat seorang *Baljuw* sebagai opsir justisi dan kepala kepolisian lalu pada tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu mejelis pengadilan di bawah pimpinan *Baljaww* yang dinamakan *College van Schepennen* disebut *schepenbank* untuk mengadili segala penduduk kota bangsa apapun kecuali pegawai dan serdadu Kompeni yang akan diadili oleh *Ordinaris luyden van den gerechte in het Casteel* yang pada 1626 diubah menjadi *Ordinaris Raad van Justisie binnen het casteel Batavia*, disebut sebagai *Raad van Justisie*. Sejak tahun 1684 VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda, hal tersebut mengakibatkan dihentikannya VOC dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan *charter* untuk daerah jajahan di Asia dimana dalam Pasal 86 *charter* tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat. Pada awal mulanya Pemerintah Kolonial Belanda masuk di daerah kota

Bulukumba sekitar pada Tahun 1920 membangun dan mendirikan sebuah Gedung Sekolah Bangsawa yang terletak di Jalan KH. Muhammad Ramli No.1 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang dimana juga diantaranya termasuk Pahlawan SULTAN DAENG RADJA ikut sekolah ditempat itu pada Tahun 1932 dengan nama Sekolah Rakyat Bapemda (SWASANTRA) dan saat itu Indonesia merdeka maka gedung itu diserahkan oleh pemerintahan Indonesiadari Pemerintahan Belanda pada tahun 1946 menjadi Nama Gedung Kantor diberi nama Lantara yang membawahi Dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba yang berpusat di Kota Bulukumba pada saat itu dipimpin oleh Ketua Bapak Hartoyo, SH pada Tahun 1950 sampai Tahun 1960 dan berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Naungan Departemen Kehakiman pada tahun 1960 dan Bapak Hartoyo pensiun pada tahun 1965 digantikan oleh Bapak Ramlan, SH dari 1965 Sampai pada Tahun 1968 dan dibantu oleh dengan nama pengatur Hukum Atau dengan nama Hakim Muda dan pada saat itu Bangunan gedung direhab dan diubah pada Tahun 1968 sampai 1970 dibawah Pimpinan Ketua Bapak Andi Hayum, SH menjabat pada tahun 1969 sampai Tahun 1974 dan dilanjutkan pimpinan Ketua Bapak Rijal, SH pada Tahun 1975 sampai Tahun 1977. Dan digantikan oleh Bapak Gultom SH dari tahun 1977 sampai Tahun 1983 dan Pengadilan Negeri Bulukumba mendapatkan dana dari APBN untuk perluasan Gedung Kantor

dan Pindah terletak di Jalan Nangka No.2 Bulukumba Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu dan saat itu Pengadilan Negeri Bulukumba sudah menjadi Klas II B saat itu pergantian pimpinan Ketua oleh Syamsuddin Rasyid, SH pada Tahun 1983 sampai pada Tahun 1984 dan digantikan oleh Bapak Andi Muhammad Yusuf, SH dari Tahun 1985 sampai 1990 dan dijabat oleh Bapak Sumijo, SH dari Tahun 1991 sampa Tahun 1994 saat itu telah menjadi Pengadilan Negeri Klas II A Bulukumba Dan Digantikan oleh Bpk Ketua Rahman, SH dari Tahun 1993 sampai Tahun 1996 dan digantikan oleh Ibu Hajja .Ona Siwa, SH dari 1996 sampai pensiun Tahun 2000 dan digantikan oleh Bapak H. Abd. Karim, SH dari Tahun 2000 Sampai Tahun 2004 dan digantikan oleh Bapak H. Agus Sutarno, SH dari Tahun 2004 sampai Tahun 2006 dan digantikan oleh Bapak Sutoto Hadi, SH Tahun 2006 menjabat 6 bulan, Pengadilan Negeri Bulukumba berubah menjadi peningkatan Kelas IB yang diresmikan Oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 7 Maret 2005 dan berganti pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Bapak H. Hizbullah, SH dari Tahun 2006 sampai 2008 dan digantikan oleh Bapak Achmad Sukandar, SH, MH Tahun 2009 sampai 7 bulan saja dan digantikan lagi oleh Bapak Ganjar Susilo, SH dari Tahun 2011 sampai 2013 dan digantikan oleh Bapak Lambertus Limbong, SH dari Tahun 2013 sampai Tahun 2014 dan digantikan oleh Bapak Arifin

,SH., M.Hum. 7 bulan ditahun 2015 dan sekarang dipimpin Oleh Bapak Ketua Chrisfajar Sosiawan ,SH., MH dan wakil ketua Khusaini, S.H.,M.H Tahun 2015 sampai sekarang, Terakhir pada tahun 2016 bapak Khusaini, SH.,MH dari wakil ketua mendapat kenaikan jabatan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dan saa ini Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba yang terletak di Jalan Nangka No.2 Bulukumba sementara dalam tahap pembangunan Gedung Baru Proto type dengan Luas Bangunan 2.160 M2 dari dana APBN ,sekarang berkantor di Jalan Anggrek No.19 Bulukumba Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba . Adapun Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bulukumba ialah seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah hukum Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis letak wilayah Kabupaten Bulukumba berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada koordinat antara 119⁰ 58' sampai dengan 120⁰ 28' bujur timur dan antara 05⁰ 2' sampai dengan 5⁰ 40' lintang selatan. Daerah ini beriklim tropika basah dengan temperatur rata-rata 26,6^o berada antara suhu maksimal 34^o C dan minimum 21,1^o C, mempunyai dua jenis musim yakni musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban udara rata-rata 27,4^o C. Kabupaten Bulukumba yang dijuluki *Bumi Panrita Lopi* mempunyai luas wilayah administrasi seluruhnya ± 1.156,67 km² dengan batas- batas :

- Sebelah utara berbatasan Kabupaten Sinjai.

- Sebelah timur berbatasan Teluk Bone.
- Sebelah selatan berbatasan Laut Flores.
- Sebelah barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.

Didistribusikan ke dalam 10 kecamatan, 28 kelurahan dan 108 desa.

10 kecamatan yaitu :

- | | | | |
|-------------------------|----------------|----|-----------|
| 1. Kecamatan Ujung Bulu | terdiri dari : | 9 | Kelurahan |
| 2. Kecamatan Ujung Loe | terdiri dari : | 1 | Kelurahan |
| | | 12 | Desa |
| 3. Kecamatan Gantarang | terdiri dari : | 3 | Kelurahan |
| | | 18 | Desa |
| 4. Kecamatan Kindang | terdiri dari : | 1 | Kelurahan |
| | | 12 | Desa |
| 5. Kecamatan Bulukumpa | terdiri dari : | 3 | Kelurahan |
| | | 14 | Desa |
| 6. Kecamatan Rilau Ale | terdiri dari : | 2 | Kelurahan |
| | | 13 | Desa |
| 7. Kecamatan Herlang | terdiri dari : | 2 | Kelurahan |

6 Desa

8. Kecamatan Kajang terdiri dari : 2 Kelurahan

17 Desa

9. Kecamatan Bonto Tiro terdiri dari: 1 Kelurahan

12 Desa

10. Kecamatan Bonto Bahari terdiri dari : 4 Kelurahan

4 Desa

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Bulukumba adalah:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Mewujudkan Kredibilitas dan Transparansi Lembaga Peradilan

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

Dengan sasaran strategis adalah :

1. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara tepat waktu.
2. Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu.
3. Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh publik.

B. *Faktor Penyebab Wanprestasi Perjanjian Kredit Di Kabupaten Bulukumba*

Setelah melakukan penelitian di pengadilan Negeri Bulukumba dengan metode penelitian lapangan, observasi dan dokumentasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut;

63 kasus wanprestasi yang di tangani oleh pengadilan Negeri Bulukumba dan sebanyak 56 kasus yang dilaporkan oleh bapak I Edy Hariadi selaku pimpinan Bank BRI Cabang Bulukumba pada tahun 2017 Sampai dengan pertengahan Tahun 2019. Dengan Jenis Putusan yang telah di minutasikan atau telah di putusan sebanyak.

No	Tahun	Jumlah
1	2017	19 kasus wanprestasi (17 kasus bank BRI dan 2 kasus wanprestasi lainnya)

2	2018	22 kasus wanprestasi (19 kasus bank BRI dan 3 kasus wanprestasi lainnya)
3	2019	22 kasus wanprestasi (semua kasus bank BRI)
	Jumlah	63 kasus wanprestasi (58 kasus bank BRI dan 5 kasus wanprestasi lainnya)

Tabel 1 Kasus Wanprestasi Tahun 2017 – 2019

Dengan rincina penyebab yang beragam baik dengan adanya unsur nasabah dengan sengaja tidak membayar bermaksud untuk tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet mzupun faktor Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Dalam kasus wanprestasi penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memeiliki hubungan dengan masalah maupun kasus wanprestasi sehingga penulis memberikan pertanyaan random dan mendapatkan jawaban dari pihak bank BRI yaitu bapak Ardiansyah dan pihak Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu bapak Syamsuddin S selaku kepaniteraan Hukum.

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari-April	5
2	Mei-Agustus	7
3	September-Desember	7

Total

19

Tabel Kasus 2 tahun 2017

Adapun Jumlah Kasus pada tahun 2017 sebanyak 17 kasus dengan kasus terbanyak pada pertengahan tahun sampai akhir tahun 2017 yaitu pada bulan mei sampai dengan desember sebanyak 19 kasus

no	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari - april	
2	Mei - Agustus	
3	September – desember	
Total		22 kasus

Bapak Ardiansyah selaku karyawan bank BRI (Costumer Service) dan beberapa staf bank BRI lainnya menjawab bererapa penyebab terjadinya Wanprestasi ialah sebagai berikut “Wanprestasi yang terjadi di bank BRI Cabang Bulukumba biasanya terjadi karena beberapa penyebab dan beberapa penyebabnya ialah pengeluaran nasabah yang banyak, kesehatan nasabah yang tiba-tiba memburuk,nasabah yang kalah berjudi, terjadi sengketa rumah tangga atau perceraian dan sering menolak panggilan dari bank.”³⁰ada pun pengertian dari penyebab wanprestasi ialah :

³⁰ Ardiansyah ,Wanwancara pihak bank BRI Cabang Bulukumba

b. Pengeluaran Banyak

Adanya nasabah yang melakukan pinjaman untuk modal usaha akan tetapi penguluran rumah tangganya lebih banyak di banding pemasukan usahanya .Karena kurangnya manajemen keuangan yang dilakukan oleh nasabah sehingga pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan sehari yang mengharuskan untuk melakukan atau melaksanakan tugas sebagai kreditur yaitu membayar pinjaman bank sebagaimana perjanjian yang dilakukan sebelumnya

c. Kesehatan Nasabah Memburuk

Adanya perbedaan penghasilan sebelum atau sesudah melakukan pinjaman entah itu dengan adanya kecelakaan yang mengharuskan pihak kreditur istirahat di rumah atau adanya biaya tambahan berupa dana berobat di rumah sakit karena yang menjadikan pihak tersebut harus melakukan pembayaran yang tambahan.

c. Nasabah di PHK

Adanya keadaan memaksa untuk melakukan wanprestasi seperti biaya tambahan untuk hidup akibat kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan keuangan tidak terkontrol karena tidak ada pemasukan dan harus ada pula tambahan pengeluaran

d. Kalah Judi

Adanya nasabah yang melakukan perjudian. Kalah judi dapat memberikan akibat negatif dalam berbagai sendi kehidupan termaksud pada dunia nasabah. Jika ada berita bahwa nasabah yang suka judi mengalami

kekalahan maka perlu diwaspadai kemungkinan menyerempet kepada penggunaan kredit bank dan akan berujung pada wanprestasi

e. Terjadi Sengketa dalam rumah tangga

Jika sebuah bisnis di kelolah oleh keluarga maka masalah yang terjadi dalam rumah tangga berdampak besar terhadap perusahaan. Jika terjadi masalah rumah tangga nasabah, bank perlu waspada kemungkinan dampak ini kepada kelancaran kredit.



f. Nasabah kawin lagi

Nasabah mau kawin lagi adalah urusan pribadi yang mungkin dicampuri oleh bank. Tetapi perlu diwaspadai, karena jika seorang dimabuk asmara, maka ia menjadi mata gelapkan permintaan sang buah hatinya.

C. *Proses Penyelesaian Kredit Macet di Pengadilan Negeri Bulukumba*

Pengadilan Negeri sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 198 tentang Peradilan Umum. Kekuasaan Pengadilan menurut pasal 50 menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dimana dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) juga disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta, dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.³¹ Masuknya perkara wanprestasi menjadi salah satu kompetensi absolut

Pengadilan Negeri tentunya menjadi tantangan bagi penegakan hukum di Lembaga negara tersebut, serta akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum terkait untuk menyelesaikannya. Tuntutan ini semakin mendesak mengingat lembaga keuangan bermunculan dengan berbagai produk yang disediakan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang membahas tentang perbankan di Indonesia, menerangkan bahwa

³¹ Ayu Agus Sari, 11 Januari 2013, *Tugas Pokok Dan Kewenangan Pengadilan Negeri*, dalam <https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/01/11/tugas-pokok-dan-kewenangan-pengadilan-negeri/>

lembaga keuangan adalah badan ataupun lembaga yang kegiatannya menarik hasil dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Dan di dalam keputusan SK Menkeu RI No. 792 Th 1990 telah dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Lembaga Keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini salah satunya termasuk perbankan dimana menyediakan berbagai produk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³² Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam kasus di atas berkaitan tentang KUHPerdara pasal 1243 yang berbunyi “ mencakup biaya penggantian, kerugian dan bunga karena tak di penuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, difference lalai untuk review mengenai perikatan itu, atau jika suatu yang harus

³² Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 huruf d Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; pengertian yang sama dituangkan dalam Pasal 1 huruf g Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

di Pengadilan Negeri tersebut melalui beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan yakni:

Pertama, mengajukan gugatan sengketa wanprestasi. Pengajuan gugatan sengketa wanprestasi oleh lembaga keuangan dilakukan dengan gugatan yang telah masuk di Pengadilan selanjutnya diproses terlebih dahulu pada bagian Panitera mulai dari administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan.

Kedua, memanggil para pihak. Pada perkara ini sudah seharusnya dilakukan pemanggilan para pihak yang terkait dengan perkara ini. Dalam pemanggilan para pihak itu sendiri haruslah mendapatkan perhatian bagi kedua belah pihak., penggugat yang dalam perkara ini adalah sebuah lembaga keuangan berbasis Perbankan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia yang telah hadir dalam persidangan dan membawa bukti-bukti yang ada dan dipergunakan dalam membuktikan gugatannya.

Ketiga, mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan sudah sepantasnya untuk ditawarkan perdamaian antara kedua belah pihak oleh Hakim Pengadilan yang disebut dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Hakim. Namun mediasi yang dilakukan

ternyata dapat dikatakan gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat walaupun telah disepakati perdamaian tetapi Penggugat tetap melanjutkan perkara kepada pihak Advokat, sehingga sidang dilanjutkan.

Keempat, perihal jawaban Tergugat. Proses mediasi tidak berhasil untuk dilakukan maka perkara dapat dilanjutkan pada persidangan yang telah ditetapkan waktunya. Berlangsungnya persidangan kemudian sampai pada memberikan jawaban Tergugat sebagaimana jawaban yang diberikan oleh Tergugat setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator atas perintah Hakim ternyata tidak berhasil. Jawaban Tergugat merupakan sebuah pernyataan yang seharusnya diucapkan oleh Tergugat pada waktu persidangan, selain itu juga diperbolehkan untuk memberikan bukti-bukti atas pernyataan yang telah disebutkan di dalam persidangan,. Tergugat tidak mampu membuktikan apapun karena memang membenarkan dalil-dalil gugatan dan membenarkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan.

Kelima, pembuktian. Setelah berbagai tahapan sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara ini, maka hakim sampai pada tahapan dimana harus mampu menemukan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan atau juga berdasarkan pada bukti yang ada.

Keenam, putusan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut menuju pada kesimpulan bahwa segala yang dinyatakan oleh Penggugat adalah benar dan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum. Sehingga kemudian Hakim

memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir. Dalam putusan akhir yang dinyatakan oleh Hakim bahwasanya pada gugatan perkara wanprestasi di lembaga keuangan oleh Penggugat dan Tergugat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Adapun pertimbangan hakim dalam pemberian putusan terkait sengketa wanprestasi ialah , Pertama, kesimpulan pembuktian. Dalam beracara di persidangan antara Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat alasan masing-masing pihak. Kedua, pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukum yang ada kasus wanprestasi , penulis setuju dengan apa yang dijadikan landasan Hakim dalam membuat keputusan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi pada Akad . Hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sebelum

membuat putusan tersebut. Hal yang menguatkan keyakinan Hakim dalam memutus perkara bahwa Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi/ingkar janji karena telah melalaikan kewajibannya/tidak pernah lagi melunasi pokok pembiayaan dan margin keuntungan kepada Penggugat, pembuktiannya dapat dinilai dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya yang diakui/dibenarkan oleh pihak Tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dan dalam hal ini telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data yang di dapatkan dari PN Bulukumba maka dapat ditarik kesimpulan berupa;

1. Faktor penyebab wanprestasi debitur di Kabupaten Bulukumba ialah karena disebabkan oleh nasabah yang tidak menyadari akan hak dan kewajibannya yang melakukan beberapa pelanggaran baik yang di sengaja maupun tidak dalam melaksanakan kewajiban seperti ;
 - a. Kesehatan Nasabah Yang Memburuk
 - b. Nasabah meninggal dunia
 - c. Nasabah kalah dalam berjudi
 - d. Sengketa rumah tangga
 - e. Bersifat terlalu mewah
 - f. Mempunyai kegiatan tertentu
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba ialah dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan intensitas atau kondisi dari nasabah yang mengalami wanprestasi

B. Saran

1. Agar pihak yang memberikan pinjaman atau pihak bank tidak asal memberikan pinjaman atau mengabulkan permohonan pinjaman sebelum melakukan survey mendalam terlebih dahulu kepada pihak kreditur agar

terhindar dari kasus wanprestasi

2. Agar pihak bank memperhatikan kondisi sosial atau kondisi masyarakat/nasabah agar putusan dapat di tunda atau di putuskan tergantung dari kondisi keuangan pihan kreditur



Daftar Pustaka

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta:Liberty, 1985), h.26
Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*.

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*.

Achmad Busro.1985, *Hukum Perikatan*. Semarang, Oetama.

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006).

Adrian Sutedi ,SH., MH , *Hukum Perbangkan*.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* 2002 (Jakarta; Sinar Grafika),h.13

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 246-247.

Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013). hlm.125.

M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*,(Jakarta: CV.Rejeki Agung.2003).

Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2005). hlm.33.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 2007 (Jakarta ; Kencana), h.94

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341

Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm 578.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979, h. 1

Sudikno Mertokusumo. 1990. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97

Sutarno.2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hlm 82.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1982), h. 148.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 179-181.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. Op.Cit. h. 179-181

Wiryono Prodjodikoro. 1979. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-VIII.

Bandung.Bale. Hlm: 9 Setiawan. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*.

Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin. Hlm: 77

Sumber Lain

[https://id.wikipedia.org › wiki › Pinjaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman)

UU no 23 Tahun 1999 jo UU no 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN-LAMPIRAN









